



ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI **MUSRENBANG** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Disampaikan Oleh:

Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri





DR. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

JABATAN : DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)

RIWAYAT PEKERJAAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Staf di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1993 – 1998 |
| 2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1998 – 2003 |
| 3. Eselon III di Badan Diklat Kemendagri | Th. 2003 – 2010 |
| 4. Karo Umum Setjen Kemendagri | Th. 2010 – 2014 |
| 5. Direktur Otsus & PD di Ditjen Otda Kemendagri | Th. 2014 – 2016 |
| 6. Kepala BPSDM Kemendagri | Th. 2016 – 2022 |
| 7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara | Th. 2018 |
| 8. Pjs. Gubernur Kalimantan Utara | Th. 2020 |
| 9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Th. 2022 – Saat ini |

Tempat/tgl lahir :
Purwokerto, 8 Maret 1967

HP. 0811858973

EMAIL : ts_please@yahoo.co.id





FOKUS PEMBAHASAN

1. KONDISI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH TAHUN 2022
2. KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL TAHUN 2023
3. ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023





1. KONDISI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH TAHUN 2022





TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:



Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan dan Pemerataan
**Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik**



Peningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah



Pembangunan Daerah :

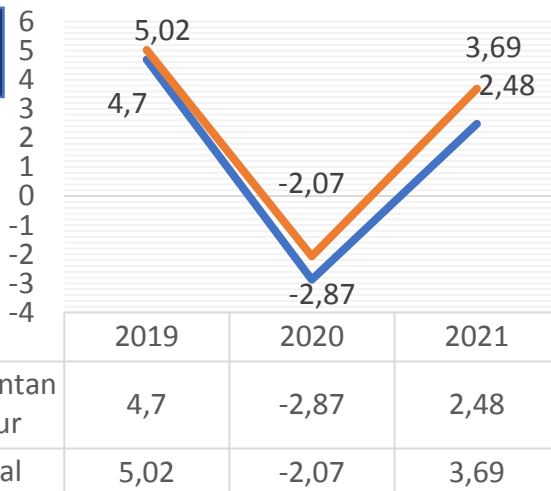
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari pembangunan nasional**



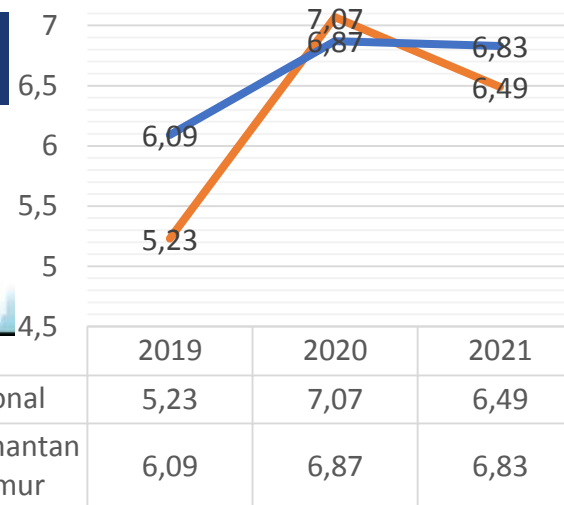
REALISASI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



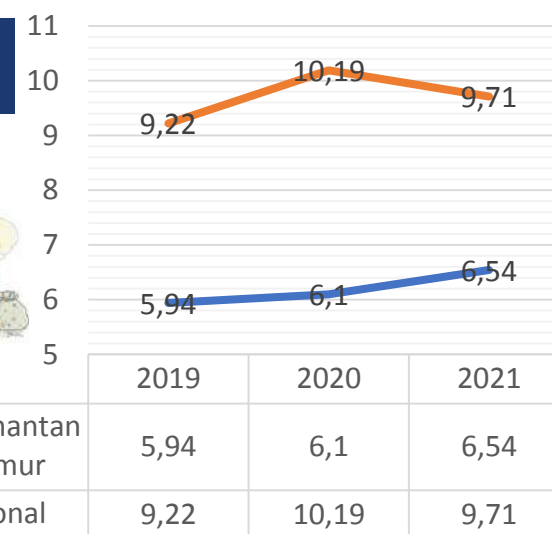
Pertumbuhan Ekonomi



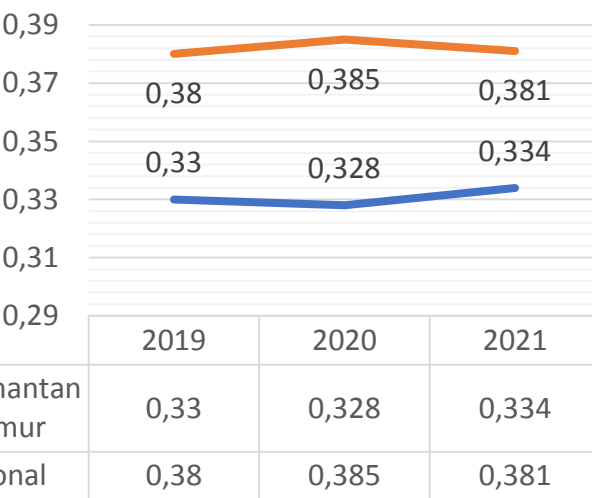
Pengangguran Terbuka



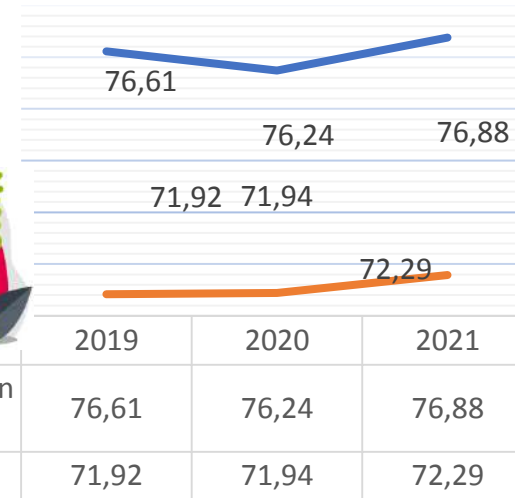
Tingkat Kemiskinan



Gini Ratio



IPM



Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar **2,48 persen**. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada **Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** sebesar **13,34 persen**.

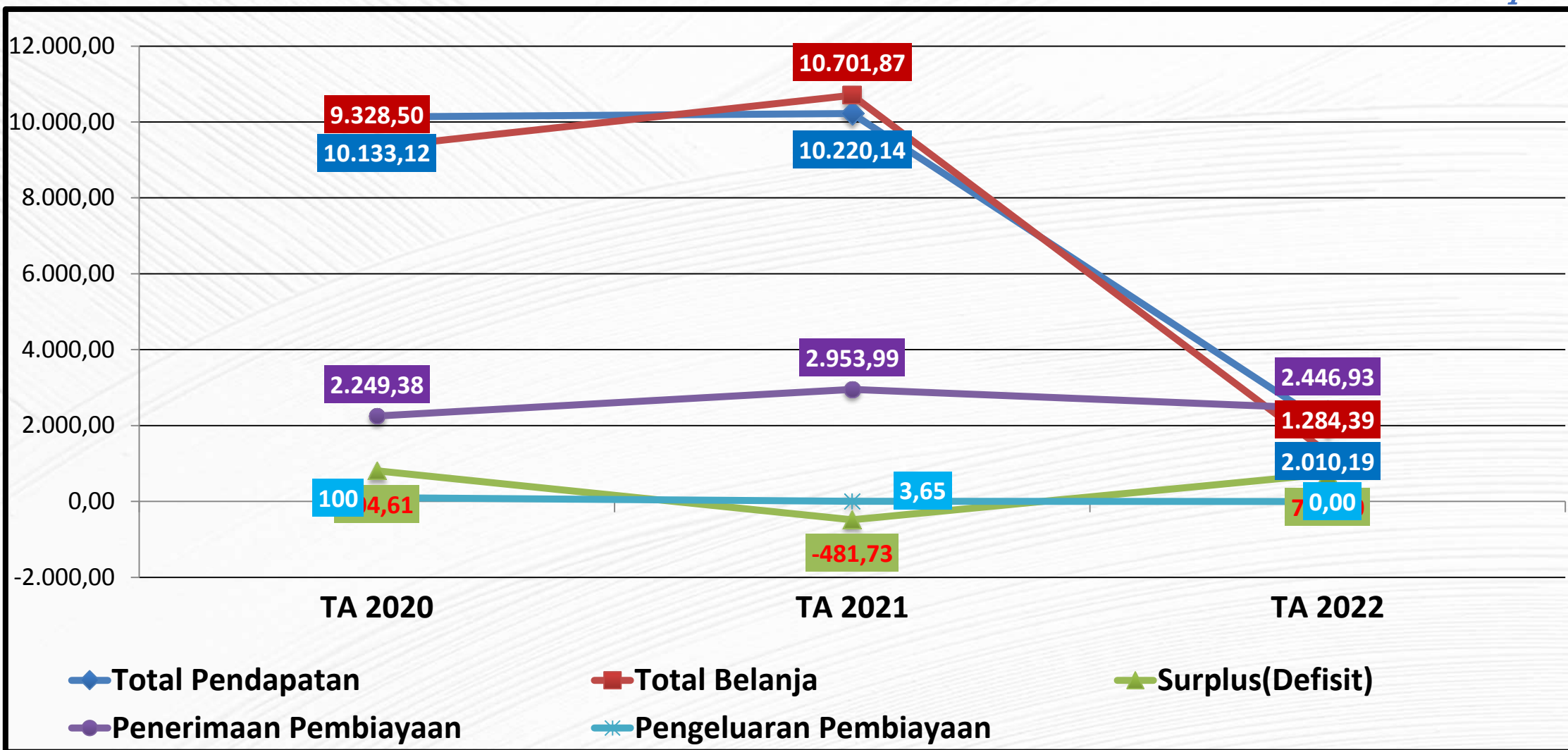




Gambaran Umum APBD Provinsi Kalimantan Timur 2020-2022



Triliun rupiah





2. KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL TAHUN 2023





OUTLOOK PERENCANAAN TAHUN 2023

Penerapan berbagai **kebijakan** sebagai implikasi terbitnya:

- UU Nomor 1 Tahun 2022 ttg HKPD;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- Permendagri 59 Tahun 2021 ttg SPM.

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2% pada tahun 2023 dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lambat sebesar 5,1%. Dikarenakan munculnya varian baru Omicron yang akan menghambat aktivitas ditambah dengan peningkatan inflasi, peningkatan utang dan ketimpangan pendapatan pada negara ekonomi berkembang

Melakukan Evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai dasar penyusunan dokrenda kedepan.

Optimalisasi penggunaan SILPA dalam membiaya program pembangunan daerah yang diprioritaskan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Penyiapan dukungan persiapan pilkada serentak Tahun 2024 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Pemulihan Covid-19 Percepatan Vaksinasi Booster ke-3 dan Penanggulangan Varian Baru Omicron serta Kesiapsiagaan Penanggulangan **Bencana** (Alam-NonAlam)

Peningkatan kualitas system Pendidikan dan Kesehatan daerah sebagai langkah preventif dalam menghadapi pandemi

Peningkatan komitmen bersama pengembangan **ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan**

Penuntasan Kemiskinan Ekstrem 0% di Tahun 2024

Optimalisasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi sebagai upaya pengembangan ekosistem digital ekonomi yang diarahkan sector informal.





Rancangan Tema RKP Tahun 2023

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”



Rancangan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan
Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka
Kalimantan Timur yang Berdaulat”





Dukungan Prioritas Urusan Nasional Tahun 2023

47 Sub Kegiatan dukungan kinerja urusan.

Rp. 2.195.317.545.766

0 Dukungan pagu terhadap kinerja urusan.

3 Urusan dengan dukungan pagu terbesar

48,7% Ur. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

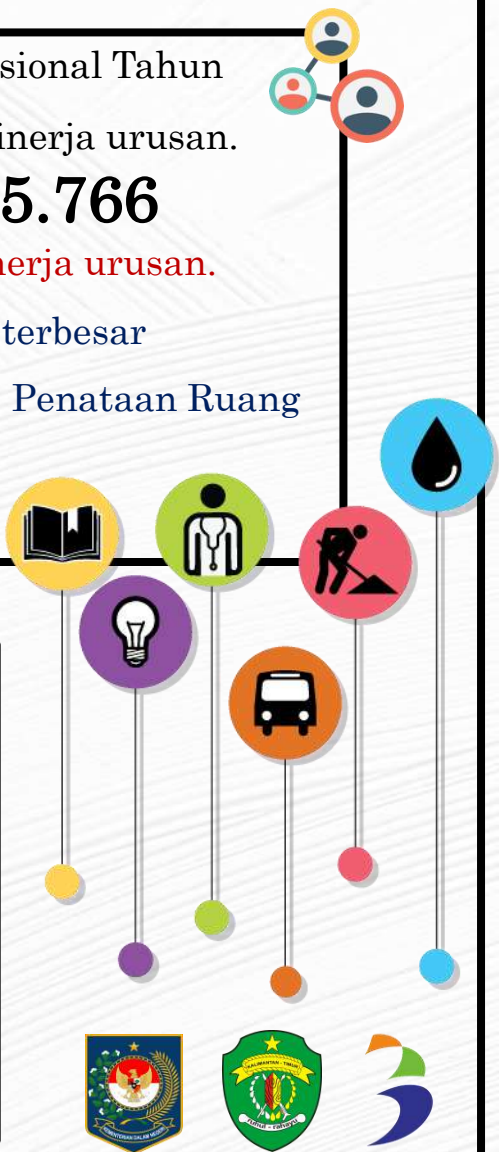
28,9% Ur. Pendidikan

4,2 % Ur. Kehutanan



**Kesepakatan Target Indikator
Makro Pembangunan Tahun 2023**

1. Pertumbuhan Ekonomi: 5.5 - 6.0 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: 6.63 - 5.89 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia: 78.17 - 78.18;
4. Rasio Gini: .328 - 0.328;
5. Tingkat Kemiskinan: 5.30 - 4.11.




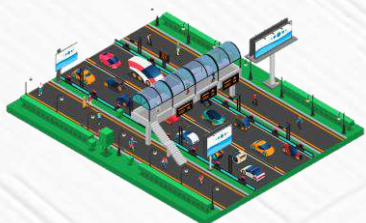
20 Usulan Proyek Kegiatan Tahun 2023

7 Diakomodir 13 Dibahas Lbh Lanjut 0 Ditolak

Daftar Proyek yang diakomodir

1. Preservasi dan Rekonstruksi Jalan Tenggarong (Kab Kukar) - Barong Tongkok - Mentiwan/Senda war (Kab. Kubar)
2. Perservasi dan Rekonstruksi Jalan SP 3 Lempake - Sambera - Santan - Bontang
3. Preservasi dan Rekonstruksi Jalan Sangatta - SP Perdau
4. Pengembangan Korporasi Desa Sapi di Kalimantan Timur
5. Program = Pengeloan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Sub Program = Register Cagar Budaya
6. Pembangunan PLTS Atap
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)





3. ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023





Latar belakang

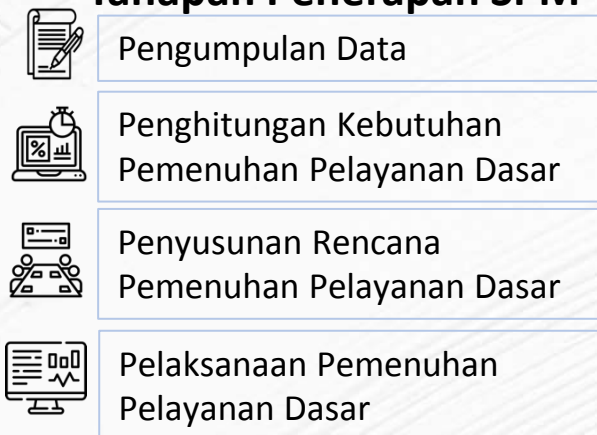
1

bahwa Permendagri 100/2018 sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan SPM sehingga perlu diganti

2

Belum optimalnya penerapan SPM dalam melaksanakan 4 (empat) tahapan penerapan, kesulitan dalam melakukan penghitungan capaian SPM 100%, pembuatan regulasi penetapan tim penerapan SPM, dan gambaran indikator kinerja dari jenis dan mutu layanan SPM

Tahapan Penerapan SPM



Penyelenggaraan SPM



Arahan Penyelenggaraan SPM



Mendorong untuk segera menetapkan tim penerapan SPM guna mempercepat penyusunan **RENCANA AKSI PENERAPAN SPM**.



Mendukung penuh penerapan SPM melalui penetapan program dan kegiatan dalam perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD).



Melaporan penerapan SPM yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dimasukkan kedalam sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi (Aplikasi Pelaporan SPM).

Pendanaan SPM



APBN
Pendanaan Binwas Pusat



APBD Provinsi
Pendanaan Binwas Provinsi



APBD Kab/Kota
Pendanaan Binwas Kab/Kota

Pembinaan Pengawasan SPM

KEMENDAGRI

**BINWAS
UMUM**

K/L TEKNIS

**BINWAS
TEKNIS**





**REALISASI PENYELENGGARAAN SPM
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Realisasi Penyelenggaraan SPM Nasional 2021

Realisasi Penyelenggaraan SPM 2020

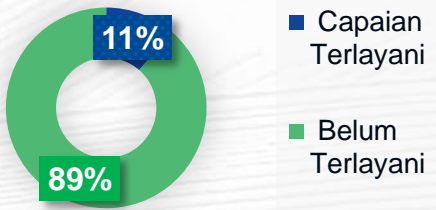
1. Pendidikan: 89,40%;
2. Kesehatan: 99%
3. Pekerjaan Umum: 73%
4. Perumahan Rakyat: 16,67%;
5. Trantibumlinmas: 78,72%;
6. Sosial: 56,55%



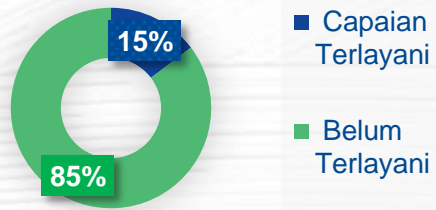
***Diharapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
se Kalimantan Timur agar segera melaporkan
capaian SPM Tahun 2021 kepada Sekber SPM
Ditjen Bina Pembangunan Daerah***



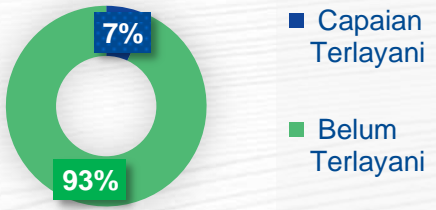
BIDANG PENDIDIKAN



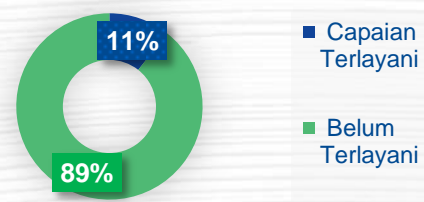
BIDANG KESEHATAN



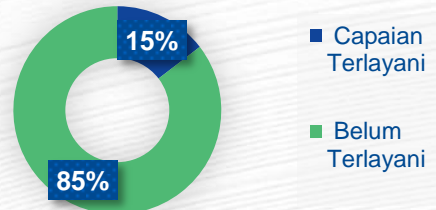
BIDANG PU



BIDANG PERKIM



BIDANG TRAMTIBUMLINMAS



BIDANG SOSIAL



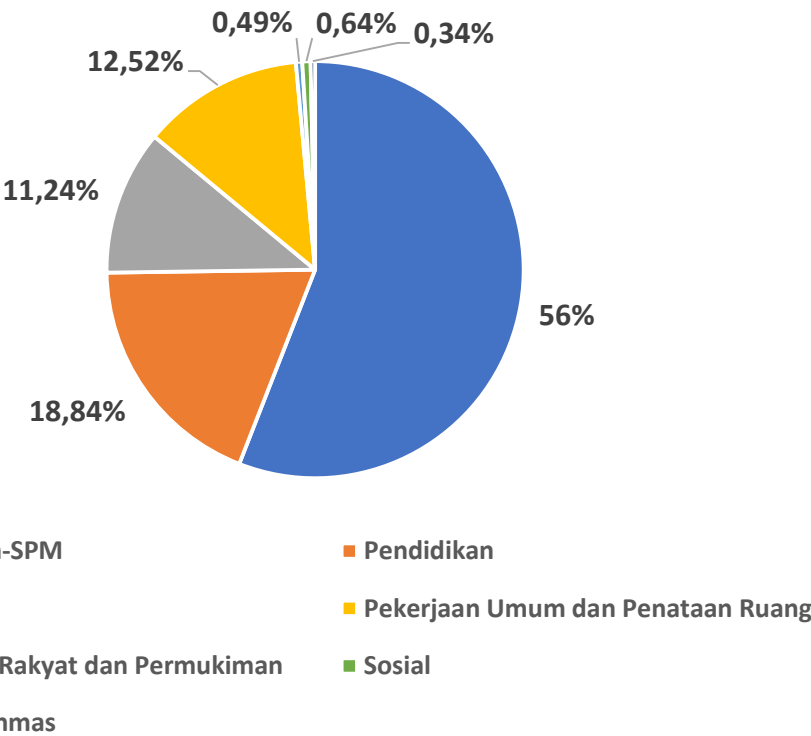
Sumber : laporan sementara spm.bangka.kemendagri.go.id





REKAPITULASI JUMLAH DAN PERSENTASE PAGU URUSAN SPM DALAM RKPD 2022

Persentase Pagu Per-Urusan SPM Dalam RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Urusan	Pagu RKPD	Persentase Pagu
Kalimantan Timur	Rp 10.806.996.675.344,00	100%
Lainnya Non-SPM	Rp 6.044.122.552.102,00	56%
Pendidikan	Rp 2.036.298.050.819,00	18,84%
Kesehatan	Rp 1.214.242.728.268,00	11,24%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.352.806.169.250,00	12,52%
Perumahan Rakyat dan Permukiman	Rp 53.000.000.000,00	0,49%
Sosial	Rp 69.253.581.905,00	0,64%
Tantribumlinmas	Rp 37.273.593.000,00	0,34%

Berdasarkan persentase pagu urusan yang berkaitan dengan urusan SPM di Provinsi Kalimantan Timur dalam RKPD Tahun 2022, secara prinsip **SPM telah diprioritaskan** dari sisi anggaran. Namun, perlu diperhatikan bahwa anggaran dimaksud diarahkan dalam rangka **pelayanan kepada masyarakat**.

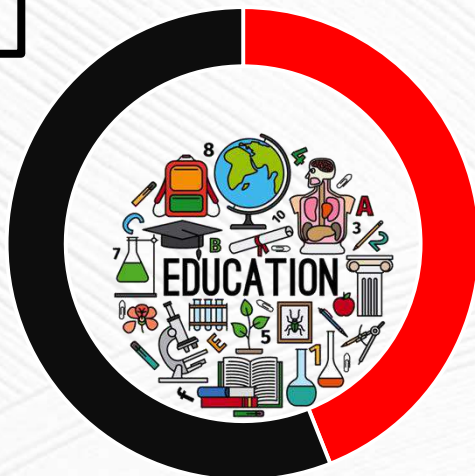




18,84% dari
Pagu RKPD
2022

Bidang Pendidikan

56%



44%

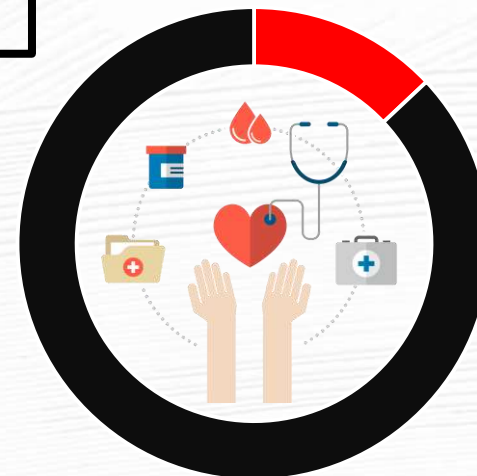
- Belanja Publik (Masyarakat)
- Belanja Non Publik

Belanja Publik: **Rp. 903.498.271.337,00**
Belanja Non Publik (*Program Penunjang Urusan*):
Rp. 1.132.799.779.482,00
Total Belanja Bid. Pendidikan: Rp. 2.036.298.050.819,00

11,24% dari
Pagu RKPD
2022

Bidang Kesehatan

87



13%

- Belanja Publik (Masyarakat)
- Belanja Non Publik

Belanja Publik: **Rp. 157.077.616.506,00**
Belanja Non Publik (*Program Penunjang Urusan*):
Rp. 1.057.165.111.762,00
Total Belanja Bid. Kesehatan: Rp. 1.214.242.728.268,00

ISU AKTUAL PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR



1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

- Mendorong tersedianya Lembaga pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan tenaga pendukung diberbagai sektor.



2. Percepatan transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal

- Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu dan bahkan jasa lingkungan serta penggunaan kawasan hutan sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industry pengolahannya (hilirisasi), diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur, paling tidak dalam mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakatnya.



3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan

- Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.



4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Melakukan upaya penurunan tingkat emisi GRK, untuk mendukung terjaganya kualitas udara dan kualitas air sehingga turut meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).





5. **Pemerintahan yang profesional dan akuntabel**

- Mendorong profesionalisme Pemerintahan melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi dan transformasi ekonomi serta meningkatkan akuntabilitas dalam rangka optimalisasi Tata kelola pemerintahan.



6. **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

- Melaksanakan dan memperhatikan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dalam penerapan SPM Se-Provinsi Kalimantan Timur, dan didukung dengan alokasi pendanaan dengan memperhatikan kodefikasi dan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta turunannya.
- Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas untuk menekan kesenjangan Capaian SPM yang terjadi di Kab/Kota sehingga pemerataan capaian bidang-bidang SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata. Dan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.



7. **Pembangunan Ibukota Negara (IKN)**

- Menyiapkan SDM yang adaptif dan mampu bersaing, Mendorong Pengembangan Sentra Industri dan Perkebunan sebagai potensi utama daerah, Meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis.



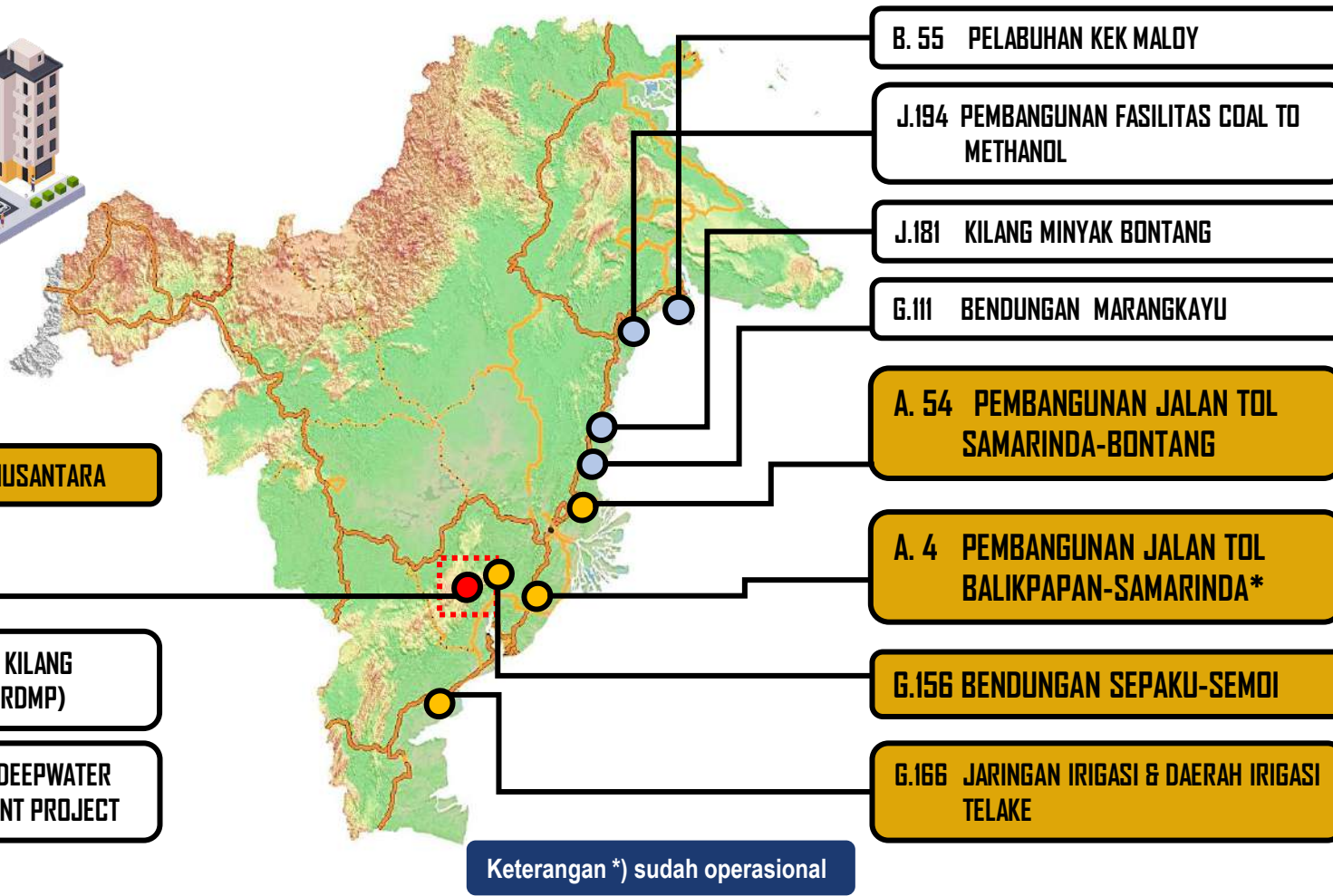
8. **Reformasi Struktural menuju Tata Normal Baru Pasca COVID-19**

- Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan penyelenggaraan publik terhadap perubahan kebutuhan yang terjadi dalam Masyarakat.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam melaksanakan pelayanan publik.
- Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.





PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PERPRES 109/2020)



Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltim, khususnya dengan hadirnya IKN





TANTANGAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING* DI RPJMN 2020-2024



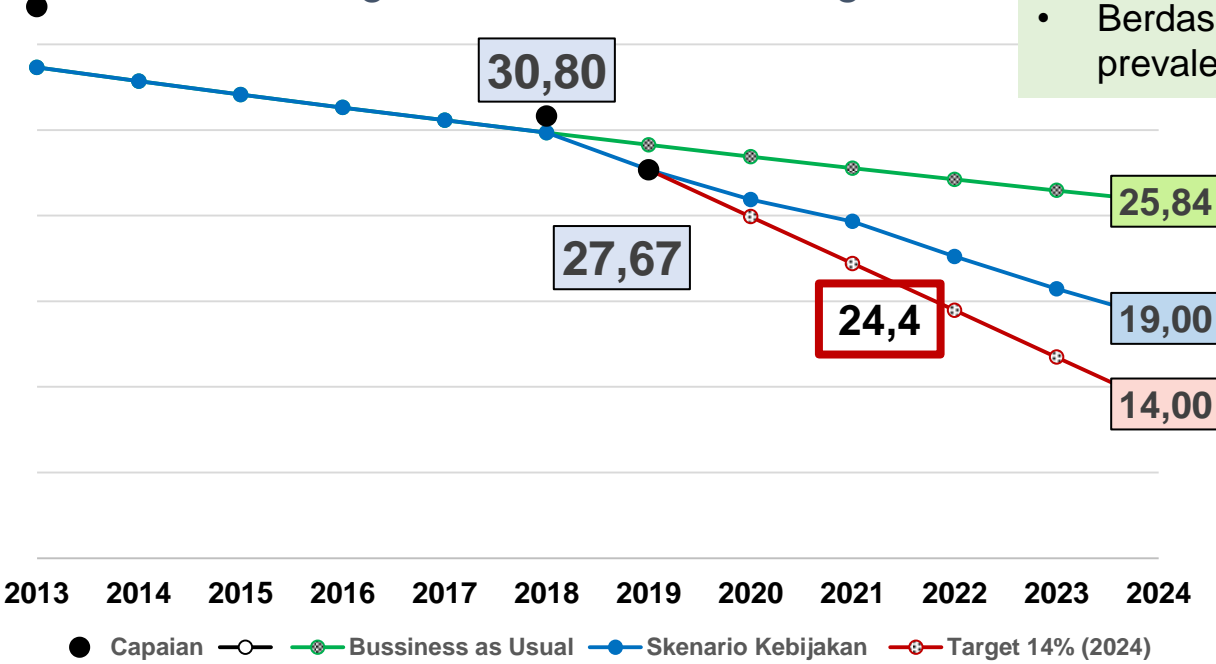
24,4%
Capaian Prevalensi
Stunting di Indonesia
(SSGI, 2021)

VS

TARGET					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%

- Tahun 2021, target penurunan *stunting* sebesar 21,1% belum tercapai karena prevalensi *stunting* masih 24,4%
- Untuk mencapai 14% di tahun 2024, masih perlu penurunan prevalensi *stunting* sebesar $24,4\% - 14\% = 10,4\%$ dalam 3 tahun
- Target penurunan *stunting* per tahun sampai 2024 harus lebih besar dari $10,4\%/3 \text{ tahun} = 3,13\%$ pertahun
- Berdasarkan Buku Hasil **Studi Status Gizi (SSGI) Tahun 2021** menunjukkan angka prevalensi *Stunting* di **Provinsi Kalimantan Timur** berada pada **angka 22,8%**

37,20 Tren *Stunting* Balita 2013-2021 dan Target 2024



Rata-rata Penurunan

- 1,3 % /tahun
- 1,7 % /tahun
- 3,4 % /tahun

Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren Saat Ini
Perlu Kerja Keras

Benchmark Tren % Penurunan *Stunting* di Negara Lain*

2%/tahun (2005-2015)	0,8%/tahun (2000-2015)
Peru	Vietnam

*World Bank (2017)



PERAN POSYANDU DAN PKK DALAM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

*Wadah kelembagaan pemeliharaan
kesehatan dari, oleh, untuk masyarakat*



1. Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita.
2. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja.
3. Kesehatan Usia Produktif.
4. Kesehatan Lanjut Usia.
5. Kesehatan Kerja.
6. Perbaikan Gizi Masyarakat.
7. Penyehatan Lingkungan.
8. Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
9. Kesehatan Tradisional.
10. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lainnya.



**Penurunan Prevalensi Stunting
mendukung
8 Aksi Konvergensi Nasional**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

*Gerakan nasional untuk
kesejahteraan keluarga dari, oleh,
untuk masyarakat.*

1. Sinergi antar Lembaga → MoU dengan Kementerian Pertanian tentang Program Ketahanan Pangan Keluarga dan MoU dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan tentang Membumikan “Gemar Makan Ikan”
2. Program Gerakan Peran Serta Masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga Indonesia.
3. Sosialisasi dan Promosi Makanan berbahan baku local.
4. Kegiatan Bedah Rumah untuk menciptakan Rumah Layak Huni (Hasil kerjasama dengan PUPR).
5. Program pengelolaan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.
6. Penetapan Daerah Percontohan Model Pencegahan Stunting.
7. Program Bantuan Langsung kepada Keluarga.
8. Program Pencegahan Pernikahan Dini.





Definisi

Kesejahteraan Masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem- setara dgn USD 1,9 PPP

Prasyarat Kondisi Pelaksanaan

1

Pertumbuhan Ekonomi
(Pengendalian Covid-Vaksinasi dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat 60% terbawah)

2

Memutakhirkan dan Mengembangkan basis data pelaksanaan program
(Perbaikan DTKS, Data UMKM dan Data Wilayah)

3

Konvergensi antar K/L dgn program khusus dan program daerah
(Bansos disabilitas, Aset transfer produktif bagi warga miskin, dan proram khusus /unik daerah)



Rapat Terbatas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

4 Maret 2020

1. Agar kemiskinan ekstrem (*extrem poverty*) pada Tahun 2024 dapat mencapai 0%;
2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 Juta jiwa;
3. Validasi data agar mencakup nama (*by name*) dan alamat (*by address*);
4. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran;
5. Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS.

Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis

21 Juli 2021

1. Walaupun menghadapi pandemi, upaya Pemerintah untuk menengani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti agar Kemiskinan ekstrem Tahun 2024 dapat mencapai 0%;
2. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi;
3. Pastikan intervensi di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Air Bersih dapat diterima;
4. Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan;
5. Libatkan sector swasta untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan;
6. Fokus pada 5 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Dukungan Pemda melalui
Pilar 2

Konvergensi Program,
Anggaran, dan Sasaran

- ☐ Bappeda → Cakupan penerima, volume bantuan, dan manajemen pelaksanaan program nasional;
- ☐ Bappeda → Penguatan Kapasitas kelembagaan koordinasi antar sector terkait;
- ☐ Lintas OPD → Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis sector unggulan daerah;
- ☐ BUMD/KADIN → Penguatan kapasitas pemerintah daerah dengan sector non pemerintah dan swasta lojkal.

Kemendagri akan melakukan
Evaluasi berkala capaian
penghapusan kemiskinan
ekstrem tingkat Kab/Kota.

Mebutuhkan koordinasi intensif antar
level pemerintahan dan sektor
pengungkit lainnya.





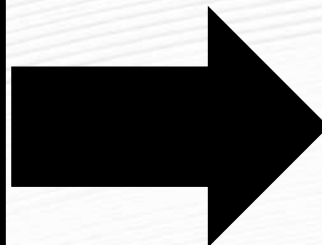
Potensi Kepariwisataan

Potensi pariwisata di Kalimantan Timur, pada umumnya sangat kaya dan beragam meliputi keindahan alam, peninggalan sejarah, seni budaya yang sangat menarik dan sangat membanggakan.

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pengembangan diarahkan pada jumlah destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang dikembangkan pada tahun 2021 sebanyak 2 destinasi, tahun 2022 sebanyak 3 destinasi, dan tahun 2023 sebanyak 3 destinasi.
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Potensi Pariwisata

- ☐ Festival Erau;
- ☐ Museum Negeri Mulawarman;
- ☐ Kepulauan Derawan;
- ☐ Pulau Sangalaki;
- ☐ Pantai Kemala; dll



Salah satu strategi pemulihan ekonomi melalui bidang pariwisata yang didasari pada penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik Sektor Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota) dan Sektor Swasta





PENGELOLAAN PERSAMPAHAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA BERKELANJUTAN

PERMENDAGRI 7/2021

**TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH**



Dasar Hukum Penyusunan Permendagri 7/2021

- UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU 39/2008 tentang Kementerian Negara
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Perpres 11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Gambaran Umum

- Skema Pelaksanaan, (Pengambilan → Pengangkutan → Lokasi pembuangan/pemusnahan Sampah)
- Subjek Retribusi, (Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan)
- Pemanfaatan Retribusi, (Penganggaran Retribusi dan pemanfaatan hasil)

Perhatian kepada Daerah :

- Pemda diamanatkan untuk memungut retribusi dalam penyelenggaraan penanganan Sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga
- Penetapan besaran Retribusi ditetapkan oleh Kabupaten/Kota sesuai Per-UU
- Hasil dari retribusi dimaksud dioptimalkan dalam rangka pengelolaan Persampahan di masing-masing daerah





“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga daripada minyak”
Presiden Joko Widodo

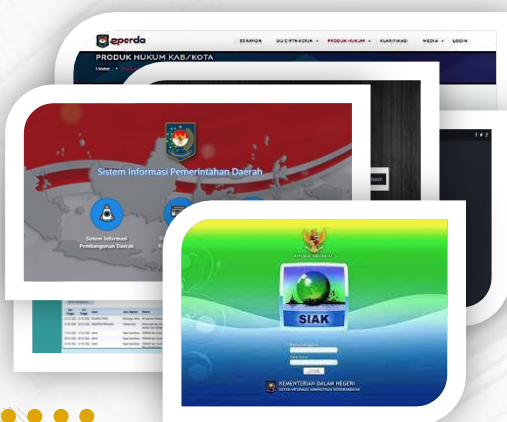
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kepres No.3 Tahun 2021 Tentang Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
(Ditetapkan 4 Maret 2021)

SATGAS P2DD dibentuk dengan tujuan **mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah**

Aplikasi Digital Kemendagri

1. **PRODESKEL** (Profil Desa dan Kel)
2. **SISKEUDES** (Sistem Keuangan Desa)
3. **E-Perda**
4. **SIPD**
5. **SIK**
6. **SIKAD** (Sistem Administrasi KDH dan DPRD)



Isu Pengembangan lain yang perlu diperhatikan dalam Dukungan Percepatan Digitalisasi di Indonesia

Pengembangan *Smart City*

Tujuan: Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, pelayanan public yang baik, ramah lingkungan, serta kota yang aman.

Aktor Pengembangan: Baik dari Pemerintah Pusat (Top Down) atau Inisiasi Pemda (Bottom-Up)

Area Pengembangan *Smart City*:

- Transportasi/Lalu Lintas
- Utilitas (Air, Listrik, sumber energi lainnya)
- Manajemen Pengelolaan Sampah/Limbah
- Manajemen Bencana (contoh: banjir)
- Pelayanan Publik
- Manajemen Pemerintahan
- Manajemen Kependudukan
- Sekolah/Lembaga Pendidikan
- Perpustakaan
- Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan
- Keamanan Digital (Digital Security) dsb.

Pengembangan *Mal Pelayanan Publik*

Berdasarkan Permenpanrb No. 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

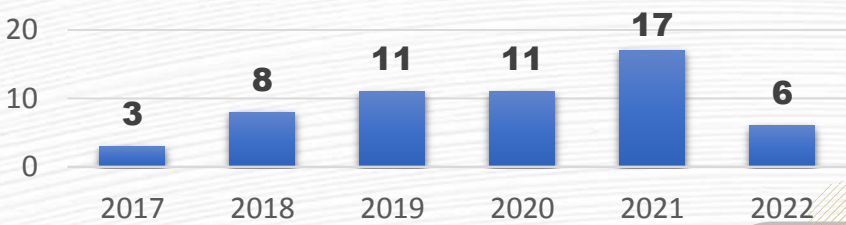
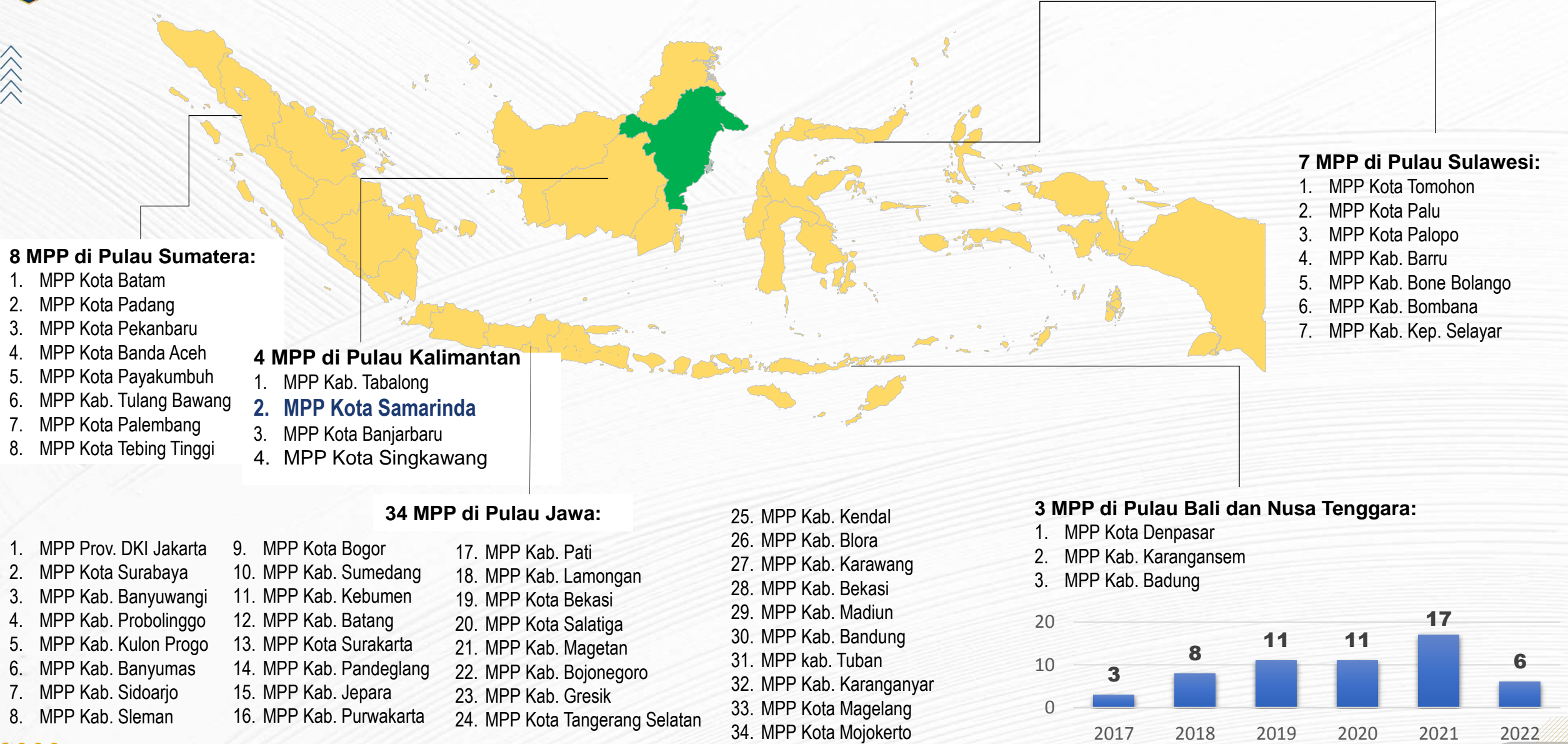
- Pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat;
- Pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat

56 MPP (salah satunya di Kota Samarinda) sudah diresmikan dari **114** daerah yang sudah berkomitmen.





56 MAL PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DIRESMIKAN





Surat Edaran Bersama Mendagri dengan Kepala LKPP

Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022




Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



- 3 -

SALINAN


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA LEMBAGA KEBUAKUAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Februari 2022
Yth. 1. Gubernur,
2. Bupati/Wali Kota,
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 027/1022/SJ
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, agar Gubernur/Bupati/Wali Kota:


- Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan ketentuan:
 - beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah masing-masing;
 - Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada angka 1 Lampiran Surat Edaran Bersama ini; dan
 - Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan.
- Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEPALA LEMBAGA KEBUAKUAN
PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH,

td
ABDULLAH AZWAR ANAS

MENTERI DALAM NEGERI,

td
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, S.H., M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199003 1 001

POIN PENTING:

- Membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang beranggotakan Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- Melaksanakan pengadaan barang/jasa
 - Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% untuk produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Koperasi.
 - **Wajib menggunakan Produk dalam negeri paling sedikit 40%.**
- Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro Kecil (UMK);
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah;
- Melakukan pengawasan;
- Sanksi terhadap Gubernur/Walikota/Bupati jika tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bersama.





Dasar Hukum



1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menko Ekonomi Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan KK dan Sekre TPIP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.50-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah.

PENGENDALIAN HARGA PANGAN

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2020-2024

Surat Ditjen Bina Bangda 500/5713/Bangda tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah, Periode Tahun 2022 – 2024



Arahan Mendagri dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan (18 Maret 2022)

- 1 Pemerintah Daerah agar mengalokasikan APBD untuk program/kegiatan pengendalian inflasi dan sinergi dengan perencanaan daerah lainnya.
- 2 Pemerintah Daerah agar untuk terus berkoordinasi dengan satgas pangan dalam rangka memastikan stabilisasi harga melalui Langkah-langkah preventif maupun korektif seperti melakukan sidak pergudangan terkait penimbunan komoditas pangan penting/strategis (contoh kasus seperti saat ini misal minyak goreng).
- 3 Pemerintah Daerah agar lebih memperkuat koordinasi menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022 yang jatuh di pada April dan Mei mendatang

Pemda mempercepat penyusunan *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah mengacu pada *Road Map* Nasional dan dengan pendekatan 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi yang efektif), serta faktor pendukung lainnya dalam pengendalian stabilisasi inflasi di Daerah.





PENUTUP



1 Pemerintah Kalimantan Timur menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023

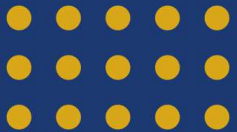


2 Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi *Covid-19*.



3 Pemerintah Kalimantan Timur segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023





TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



G20
INDONESIA
2022

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif